

Perancangan Aplikasi E-Democracy Untuk Mengembangkan Budaya Demokrasi Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Paramadina)

Yeni Nuraeni
Program Studi Teknik Informatika
Universitas Paramadina
Email : yeninur@hotmail.com

Abstrak

Komunitas kampus merupakan obyek yang sangat ideal bagi pendidikan demokrasi di negara Indonesia, karena dilingkungan kampus inilah tempat penyiapan generasi muda yang mempunyai intelektual tinggi sehingga diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam pelaksanaan system demokrasi di Indonesia yang santun dan kondusif. Komunitas kampus adalah sebuah keluarga besar yang meliputi tiga komponen yaitu tenaga akademik, mahasiswa dan tenaga administrasi. Ketiga komponen ini melaksanakan tugas dan fungsi serta peran sesuai kedudukan kewenangannya, diharapkan semua komponen dapat mengembangkan kapasitasnya secara maksimal untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan tinggi yaitu membangun karakter sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat. Proses seleksi pimpinan maupun pengambilan keputusan yang bersifat strategis lainnya di perguruan tinggi idealnya melibatkan ketiga komponen tersebut di atas, pada kenyataannya saat ini pada umumnya proses seleksi pimpinan dan pengambilan keputusan strategis di perguruan tinggi hanya melibatkan sebagian kecil dari komunitas kampus yang biasanya tergabung dalam senat fakultas/universitas. Universitas Paramadina yang saat ini dipimpin oleh sekelompok intelektual muda, mempunyai misi untuk dapat menciptakan model demokrasi yang sehat dilingkungan kampus dengan cara selalu berusaha melibatkan seluruh komponen komunitas kampus dalam memutuskan segala sesuatu yang bersifat strategis demi kemajuan bersama.

Untuk melaksanakan misi tersebut di atas maka perlu dirancang sebuah aplikasi e-democracy yang berfungsi sebagai alat bagi seluruh komunitas kampus untuk menyalurkan aspirasinya demi kemajuan Universitas. Aplikasi e-democracy ini salah satunya dapat menjadi media untuk berkampanye bagi calon-calon pimpinan universitas mulai dari jabatan struktural yang paling bawah yaitu ketua program studi dan setiap anggota komunitas kampus dapat menyalurkan aspirasinya dalam menilai calon pimpinan tersebut melalui aplikasi ini, selanjutnya pihak top management dalam mengambil keputusan wajib memperhatikan aspirasi yang disampaikan lewat aplikasi e-democracy tersebut.

Kata Kunci : E-Democracy di Perguruan Tinggi

1. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah institusi maka kampus memiliki statuta dan tata terbit yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini akan mengatur kedudukan dan kewenangan untuk berkarya bagi tenaga pengajar dan mahasiswa. Statuta dan tata terbit ini berkaitan pula dengan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar untuk berekspresi termasuk mekanisme demokrasi. Sebagai sebuah organisasi maka kampus memiliki pemimpin yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan kapasitas sumberdayanya. Proses pemilihan pimpinan pada umumnya berdasarkan mekanisme organisasi yang mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan, kemampuan pribadi atau kompetensi dan dukungan komunitas atau kredibilitas seharusnya merupakan faktor yang sangat menentukan kepemimpinannya.

Pada umumnya proses seleksi pimpinan di perguruan tinggi hanya melibatkan tenaga pengajar berdasarkan pertimbangan yang berhak menjadi pimpinan adalah tenaga pengajar yang sudah memenuhi syarat tertentu. Tenaga administrasi dan mahasiswa pada umumnya tidak dilibatkan dalam proses seleksi kecuali dapat memberi masukan melalui pooling yang sifatnya tidak mengikat. Proses seleksi tidak terpengaruh oleh hasil pooling karena tenaga pengajar dianggap memiliki integritas yang berorientasi kepada kepentingan bersama bukan mekanisme politik kelompok. Pada kenyataannya sering terjadi pimpinan perguruan tinggi tidak dapat diterima oleh seluruh komunitas kampus salah satunya oleh kelompok mahasiswa, sehingga sering terjadi demo yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menurunkan seorang pemimpin perguruan tinggi dari jabatannya. Mahasiswa pada umumnya berunjuk rasa menuntut transparansi proses pemilihan pimpinan dan menuntut agar dilibatkan secara aktif dalam proses pemilihan pimpinan, karena mereka merasa merupakan unsure terbesar dari sivitas akademika.

Universitas Paramadina menyadari demokrasi itu berlaku universal, tidak terikat oleh tempat, ruang dan waktu. Di tingkat Negara, Indonesia sudah menerapkan mekanisme pemilihan langsung untuk memilih wakil

rakyat serta pimpinan eksekutif. Terwujudnya pemilihan langsung tersebut sesungguhnya tidak lepas dari peran perguruan tinggi khususnya yang berkecimpung dalam ilmu politik dan ilmu hukum. Ironisnya mereka yang menggagas konsep atau aturan justru pada institusi mereka dalam hal penentuan pimpinan pada tingkat universitas (rektor, pembantu rektor, direktur bidang akademik/ non akademik), fakultas (dekan), maupun tingkat yang lebih rendah (ketua jurusan, manager akademik/non akademik) justru dipilih dengan mekanisme pemilihan tidak langsung. Dengan kata lain, dipercayakan kepada anggota senat perguruan tinggi atau senat fakultas maupun kelompok komunitas tertentu lainnya di lingkungan kampus.

Terkait dengan tuntutan perkembangan demokrasi di Negara Indonesia saat ini, Universitas Paramadina mengagap sewajarnya dalam pemilihan pimpinan, institusi perguruan tinggi sedapat mungkin mengupayakan dapat melibatkan seluruh komunitas kampus. Meskipun institusi itu bukan lembaga politik, tetapi tidak ada salahnya dalam menentukan semua jajaran pimpinan di perguruan tinggi melibatkan civitas akademika seperti mahasiswa/perwakilan mahasiswa, dosen, staf akademik, dengan harapan pemimpin yang terpilih benar-benar legitimate sesuai dengan prinsip demokrasi.

Tentunya tidak mudah mewujudkan demokrasi langsung di lingkungan perguruan tinggi, diperlukan komitmen dari seluruh civitas akademika maupun kesediaan sarana dan prasarana pendukung. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk memudahkan terwujudnya demokrasi yang kondusif di lingkungan perguruan tinggi adalah tersedianya perangkat lunak yang dikenal dengan **'e-democracy'**. Melalui demokrasi berbasis elektronik ini, aspirasi seluruh civitas akademika dimungkinkan dimasukkan dalam software khusus. Aspirasi ini dapat berupa penilaian terhadap kandidat-kandidat pimpinan di lingkungan perguruan tinggi.

Perancangan aplikasi e-demokrasi di Universitas Paramadina bertujuan untuk mengembangkan budaya demokrasi yang kondusif di lingkungan kampus Paramadina. Bentuk e-democracy yang akan dikembangkan berupa aplikasi web dan mobile-voting. Dengan tersedianya perangkat lunak e-democracy ini, seluruh aspirasi civitas akademika dapat tertampung dan akan selalu menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan pimpinan dari level tertinggi sampai level terendah sehingga diharapkan pimpinan yang terpilih mempunyai legitimasi yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugasnya sesuai amanat yang diberikan oleh seluruh komunitas kampus.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Content Management System

Perangkat lunak berbasis web berkembang dengan pesat, baik dari segi penggunaan, ukuran, bahasa yang digunakan dan kompleksitasnya. Aplikasi web pada mulanya hanya berupa situs web yang bersifat statis dan navigation oriented, serta cenderung banyak digunakan sebagai brosur produk atau profil perusahaan online. Pada saat ini aplikasi web telah banyak yang bersifat dinamis, interaktif dan task oriented untuk digunakan dalam sistem informasi, perdagangan, telekomunikasi, perbankan dan lain-lain.

Content Management System atau lebih populer dengan singkatan CMS, pertama kali muncul sebagai jawaban atau solusi dari kebutuhan manusia akan penyediaan informasi yang sangat cepat. Pengembangan website di era tahun 90-an sangat sederhana dimana dengan hanya mengandalkan bahasa pemrograman HTML dan beberapa gambar serta informasi yang statis, sebuah perusahaan berusaha sebaik mungkin menampilkan informasi dalam perusahaan, pihak manajemen mau tak mau haruslah berhubungan terlebih dahulu dengan pihak humas sebelum akhirnya semua bahan diserahkan kepada pihak webmaster. Pihak inilah yang nantinya akan mengadakan perubahan terhadap isi website. Dapat dibayangkan bila hal yang sama terjadi terus-menerus, berulang kali dan dalam kuantitas yang besar, seberapa banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk memproses semuanya. Selain tidak efisien, biaya operasional yang harus dikeluarkan juga sangatlah besar. Tentunya saja situasi seperti ini tidak diinginkan oleh setiap orang. Dapat dikatakan sebuah metode atau sistem yang dapat meningkatkan tingkat produktivitas dan efisiensi dalam pengembangan website sangatlah dibutuhkan. Dan salah satu solusi yang tepat untuk ini adalah dengan menerapkan **Content Management System (CMS)**.

CMS secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada para penggunanya dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi sebuah website dinamis tanpa dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis. Dengan demikian setiap orang, penyusun maupun editor, setiap saat dapat menggunakannya secara leluasa untuk membuat, menghapus atau bahkan memperbaharui isi website tanpa campur tangan langsung dari pihak webmaster.

Karena CMS memisahkan antara isi dan desain, konsistensi tampilan dapat senantiasa dijaga dengan baik. Setiap bagian dari website dapat memiliki isi dan tampilan yang berbeda-beda, tanpa harus khawatir kehilangan identitas dari website secara keseluruhan. Oleh karena semua data disimpan dalam satu tempat, pemanfaatannya informasi untuk berbagai keperluan dapat dengan mudah dilakukan. CMS Juga memberikan fleksibilitas dalam mengatur alur kerja atau workflow dan hak akses, sehingga memperbesar kesempatan berpartisipasi dari pengguna dalam pengembangan website. Hal ini akan sangat menguntungkan bila website yang dikelola memiliki kompleksitas yang tinggi dan mengalami kemajuan yang cukup pesat.

b. Management Informations System

Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi bagi kebutuhan para manajer dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan dalam rangka mengendalikan seluruh aktivitas organisasi. Sistem informasi manajemen ditujukan untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan seluruh aktifitas organisasi, keluaran dari sistem ini utamanya ditujukan bagi manajemen di tingkat taktis. Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan harus ditujukan untuk pengambilan keputusan yang bersifat taktis.

Muatan informasinya agak terinci dan berkaitan dengan kejadian masa lalu maupunantisipasi masa mendatang. Di samping itu sifatnya lebih banyak menghasilkan informasi mengenai kondisi internal organisasi dari pada kondisi eksternalnya. Data yang dibutuhkan untuk ini didapat dari hasil pengolahan sistem informasi operasional. Informasi yang disajikan dari sistem informasi manajemen biasanya dalam bentuk laporan-laporan yang formatnya telah ditentukan sebelumnya, baik yang direpresentasikan dalam bentuk laporan tertulis (hardcopy) maupun tampilan-tampilan pada layar komputer.

c. Decision Support System

Sistem pendukung keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mempertinggi efektifitas pengambil keputusan dari masalah semi terstruktur. Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang berkaitan langsung dengan proses pengambilan keputusan baik yang bersifat semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Perbedaan utama dengan sistem informasi manajemen adalah bahwa sistem informasi manajemen menghasilkan informasi yang lebih bersifat rutindan terprogram, sedangkan sistem pendukung keputusan sudah dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan yang spesifik.

Data yang digunakan pada decision support system berasal dari data internal maupun eksternal, maka banyak hal yang tingkat kepastiannya rendah. Oleh karena itu, suatu sistem yang mampu memberikan berbagai alternatif keputusan dalam waktu yang cepat sangat dibutuhkan. Disinilah sistem pendukung keputusan yang berbasis komputer dapat berperan dengan baik.

3. METODE PENELITIAN

a. Konsep Demokrasi Dalam Pemilihan Pimpinan di Lingkungan Universitas Paramadina

Proses demokrasi dalam pemilihan pimpinan di lingkungan kampus Paramadina walaupun tidak menganut pemilihan secara langsung tetapi proses seleksi seorang pemimpin akan melalui beberapa tahap yaitu mekanisme penjurangan oleh seluruh civitas akademika dan proses pertimbangan oleh senat fakultas/univeristas/pimpinan yang lebih tinggi levelnya. Bentuk pertimbangan terhadap kapasitas dan kapabilitas calon melalui proses seleksi bukan pemilihan (selection not election) berdasarkan kelayakan dan kepatutan untuk memimpin perguruan tinggi.

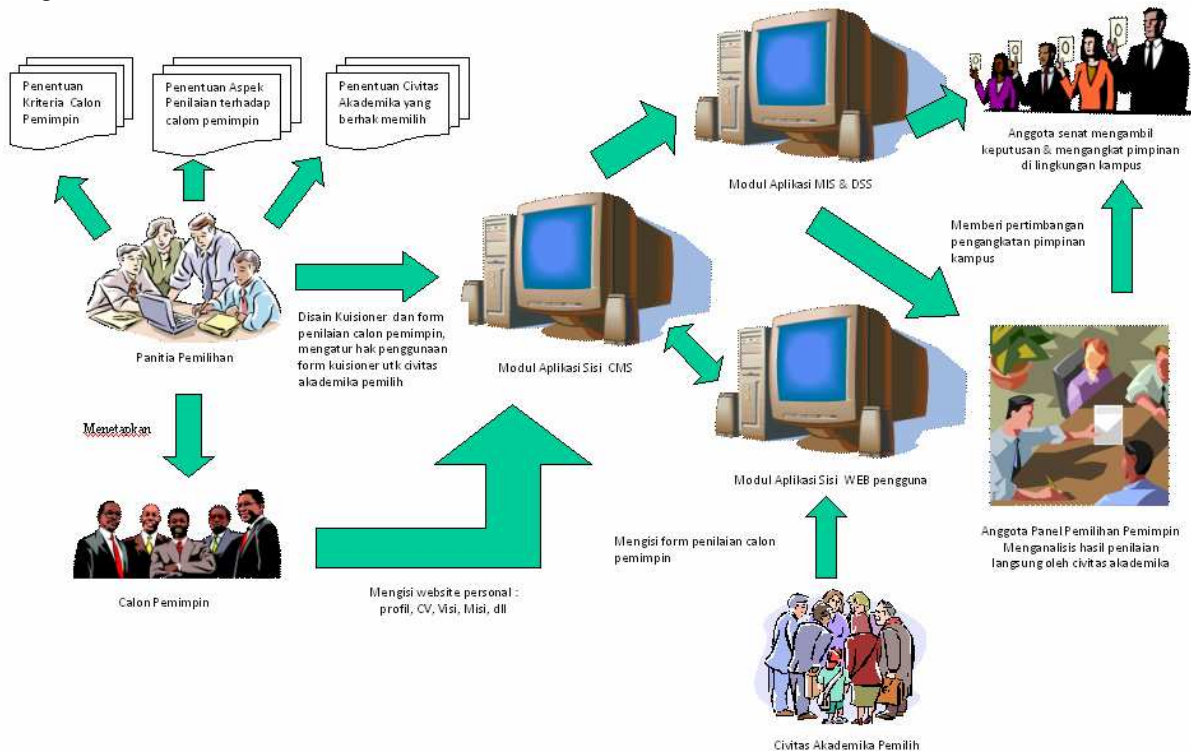
Proses seleksi diatur oleh panitia pemilihan sesuai mekanisme pemilihan dari penentuan syarat bakal calon sampai penetapannya. Panitia mengumumkan daftar nama tenaga pengajar atau pegawai non akademik yang berhak masuk proses seleksi dan menentukan bakal calon berdasarkan kesediaannya. Setiap bakal calon harus menyusun platform yaitu kerangka pemikiran dan komitmen yang dapat menggambarkan kemampuan dalam memahami masalah dan mencari jalan keluarnya dalam aplikasi berbasis web yang telah disediakan, ini dapat diasumsikan sebagai media kampanye bagi setiap calon. Panitia pemilihan inipun bertugas menentukan civitas akademika yang berhak menyalurkan aspirasinya pada tahap penjurangan bakal calon tersebut.

Tahap pertama dimulai dari penjurangan bakal calon melibatkan seluruh civitas akademika yang dianggap berhak melakukan penilaian pada bakal calon ,misalnya dalam pemilihan ketua program studi maka proses penjurangan akan melibatkan seluruh mahasiswa dan dosen program studi yang bersangkutan, seluruh staf akademik , staf non akademik yang berhubungan langsung dengan kegiatan akademik yang dilakukan oleh program studi, atasan langsung maupun atasan tidak langsung. Panitia mengirimkan borang penjurangan beserta platform kepada civitas akademika yang berhak memberikan penilaian pada calon pimpinan melalui aplikasi berbasis web, penilaian ini akan menjadi bahan pertimbangan utama yang digunakan pada tahap kedua dalam menentukan siapa saja yang dianggap mampu memimpin. Pemilihan pimpinan akan berdasarkan pemahaman tentang platform yang menggambarkan kompetensinya. Selain itu berdasarkan proses interaksi bakal calon dengan komunitas serta integritasnya sebagai referensi tentang kredibilitasnya. Dalam borang penilaian yang disampaikan lewat aplikasi berbasis web dibuat kolom penilaian tentang bakal calon yang menyangkut kapasitas dan kapabilitas dalam kurun waktu tertentu. Panitia akan mengumumkan hasil penilaian setiap calon secara transparan lewat aplikasi berbasis web. Proses penjurangan sebagai mekanisme seleksi tahap awal yang tidak memilih (satu bakal calon) tapi menyeleksi kumpulan bakal calon. Proses ini dapat mengurangi emosionalitas dan meningkatkan rasionalitas serta menekankan integritas sebagai jati diri warga kampus.

Tahap kedua dari proses demokrasi menentukan pimpinan di lingkungan kampus Paramadina disebut dengan proses pertimbangan. Senat fakultas/universitas, atasan langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan bidang yang akan dipimpin oleh calon berfungsi memberi pertimbangan terhadap calon berdasarkan hasil penilaian dari civitas akademika pada proses penjurangan. Mekanisme ini sesuai dengan fungsi senat antara lain menilai laporan pertanggungjawaban tugas pimpinan seperti dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1996 tentang pendidikan tinggi yang menyatakan bahwa senat fakultas/universitas memberi pertimbangan terhadap calon yang diajukan untuk menduduki jabatan pimpinan di perguruan tinggi. Universitas Paramadina menggunakan mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan sebagai mekanisme yang dapat menilai sekaligus mengukur kemampuan calon. Kompetensi tentang pengelolaan perguruan tinggi dan pengalaman masa lalu serta rencana masa depan dapat diketahui.

Proses pertimbangan dilakukan dengan cara melakukan panel penilaian, dihadiri oleh 5 – 7 orang yang ditetapkan sesuai dengan kepentingan. Penentuan anggota panel berdasarkan kesepakatan tentang kapasitas dan performa yang diharapkan dapat memberi pertimbangan yang tepat. Proses penilaian oleh panel dihadiri oleh seluruh anggota senat yang seterusnya memberi penilaian berdasarkan beberapa criteria/indicator dalam borang pertimbangan. Mekanisme ini dapat menentukan calon yang layak dan patut karena proses seleksi secara langsung dan terbuka. Proses ini dapat menjadi pertarungan terhadap kredibilitas senat sebagai lembaga normative tertinggi berdasarkan opini anggotanya. Penilaian ini tidak hanya memilih siapa tapi lebih penting apa yang akan dikerjakannya untuk kepentingan bersama.

Proses demokrasi dalam pemilihan pimpinan di lingkungan Universitas Paramadina dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 : Rancangan Proses E-Democracy Pemilihan Pimpinan di Universitas Paramadina

b. Kriteria Pemimpin di Lingkungan Universitas Paramadina

Sebagai seorang pemimpin sudah tentu harus memiliki kemampuan yang lebih baik dari yang dipimpin. Sekurang-kurangnya ada tiga kriteria pemimpin yang ditetapkan oleh Paramadina dalam pemilihan pemimpin-pemimpin kampus yaitu :

1. kompetensi → Kompetensi berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikapnya terhadap bidang yang dikelolanya, dapat dinilai dari platform.
2. kolaborasi → berkaitan dengan kemampuan dalam mengembangkan kerjasama dalam upaya pengembangan institusi, dapat diukur dari pengalaman dalam memimpin dan hasil yang dicapai.
3. komunikasi → berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi untuk mendukung kompetensi dan kemampuan bekerjasama, dapat dinilai dari kemampuan dalam menyampaikan pokok pikiran baik dalam bentuk tulisan dalam berbagai karyanya maupun secara lisan dalam berbagai forum.

Ketiga komponen ini dinilai dan diukur dalam skala lokal dan nasional serta internasional sehingga dapat ditentukan pemimpin sebagai panutan karena kehebatannya. Dalam pemilihan pimpinan Universitas Paramadinapun menimbang tiga aspek penting yaitu :

1. Intelektualitas → tergambar dari pola pikir
2. Interaksi → ditunjukkan oleh pengalaman dan keberhasilan dalam memimpin
3. Integritas → tergambar dari respon terhadap kepemimpinan yang tidak bermasalah dan tidak membawa masalah serta tidak meninggalkan masalah.

Calon-calon pemimpin diwajibkan melakukan kampanye lewat aplikasi berbasis web yang menunjukkan bahwa mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan, setiap civitas akademika yang berhak memberi penilaian dapat langsung memberikan aspirasinya lewat aplikasi berbasis web yang telah disediakan.

c. Metode Pengembangan Perangkat Lunak E-Democracy Untuk Pemilihan Pimpinan di Universitas Paramadina

Aplikasi yang akan dikembangkan menerapkan sistem Content Management System (CMS) berdasarkan pertimbangan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat produktivitas dan efisiensi dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam membangun aplikasi adalah sebagai berikut :

1. Analisis Kebutuhan
Pada tahap ini dilakukan studi pustaka dan analisis mengenai kebijakan-kebijakan dan kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan pimpinan, pada tahap ini juga buat kuesioner-kuesioner yang akan digunakan sebagai alat untuk menilai calon-calon pemimpin oleh civitas akademika yang berhak ikut serta memberi pertimbangan dalam proses pemilihan pimpinan di lingkungan kampus Paramadina
2. Perancangan dan Desain, terdiri dari beberapa langkah
Arsitektur data → yaitu menentukan sumber data apa saja yang dibutuhkan, dimana letaknya dan bagaimana cara mengaksesnya.
Arsitektur perangkat lunak → pada tahap ini ditentukan software yang akan digunakan, apa saja yang akan dibuat menggunakan software tersebut, fungsi-fungsinya yang akan buat serta bagaimana menggunakan dan memanggilnya.
Arsitektur tampilan → pada tahap ini dilakukan desain tata letak dan tampilan
Arsitektur infrastruktur → menentukan website akan diletakkan di server mana, dimana software akan dijalankan, serta platform komputer apa yang akan digunakan
3. Implementasi, terdiri dari beberapa langkah
 - Pembuatan halaman-halaman /file template
 - Membangun dan menguji kode aplikasi dan fungsi-fungsi yang digunakan
 - Menginstal komponen infrastruktur yang dibutuhkan
 - Menginstal dan menjalankan system

Ada 4 aspek yang akan dibangun di sini, yaitu :

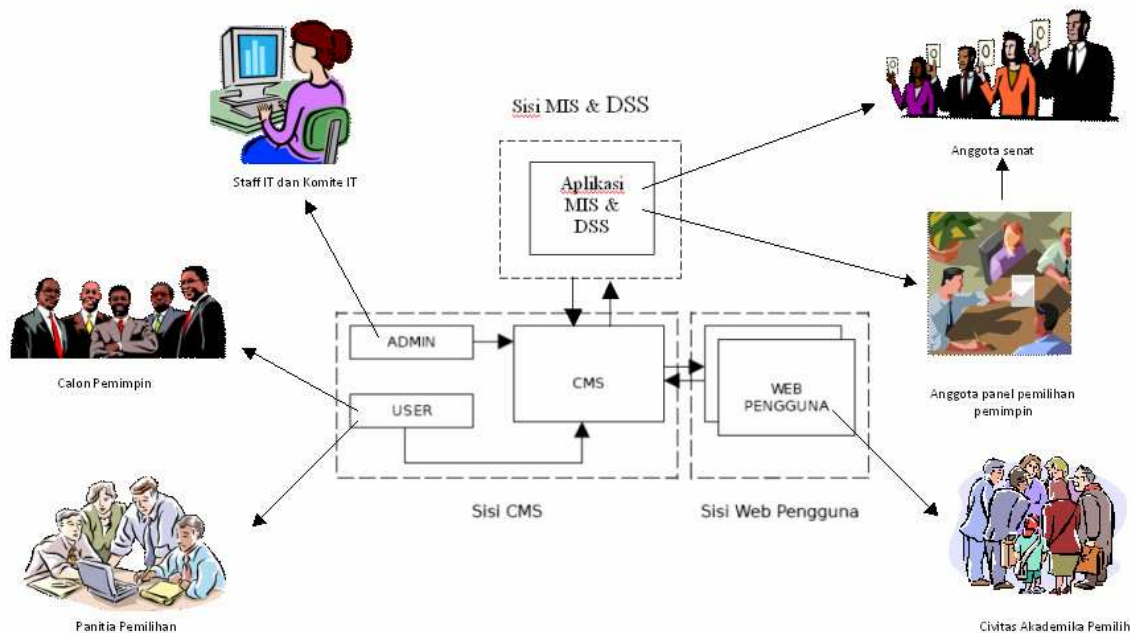
1. **Aspek User Area** → adalah pengguna CMS yang telah diberi akses dan kewenangan berdasarkan level. Akan ada dua level pengguna yakni admin dan user biasa yang satu sama lain memiliki kewenangan dan ruang lingkup yang berbeda.
Admin area → Administrator CMS mempunyai kewenangan sebagai superuser yang mengatur pengguna dan kewenangannya. Hanya ada satu user administrator sebagai superuser. Pengguna yang memiliki level Administrator memiliki beberapa kewenangan diantaranya pengaturan user meliputi : membuat user baru, Mengaktifkan dan non-aktifkan user, dan menghapus User.
User biasa → User yang diberi hak untuk menggunakan CMS dapat dengan leluasa mengatur dan mengelola data yang ada pada websitenya. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pengguna tersebut adalah : Pengaturan Navigasi (menu), Pengaturan Kategori Halaman, Pengaturan Isi Halaman, pengaturan modul-modul (berita, buku tamu, jajak pendapat), Pengaturan Profil, Perubahan Password, Theme dll. Yang termasuk kategori user biasa disini adalah para calon pemimpin yang akan dapat mengelola websitenya masing-masing dalam rangka kampanye, serta panitia pemilihan yang bertugas untuk mengelola materi penilaian dari masing-masing calon yang akan digunakan oleh civitas akademika yang telah ditentukan berhak melakukan penilaian terhadap calon pemimpin tertentu.
2. **Aspek CMS** → Interface yang digunakan pengguna untuk mengelola websitenya secara online. CMS yang akan dibangun memiliki beberapa komponen diantaranya menu utama, kategori halaman, halaman dan beberapa modul tambahan seperti berita, buku tamu dan jajak pendapat. Selain itu tersedia pula keperluan untuk konfigurasi profil dan informasi website pengguna. Setiap pengguna yang telah memiliki akses login user selain admin akan masuk ke interface urser area, di user area pengguna dapat dengan leluasa mengelola database untuk websitenya.

3. **Aspek Website Pengguna** → Website pengguna berupa template yang akan dijadikan sebagai interface yang akan menampilkan database yang dikelola oleh CMS. Berita, menu, halaman dan beberapa modul akan menjadi isi dari website tersebut yang secara online dikelola di CMS. Yang termasuk Pengguna web adalah civitas akademika yang diberi hak untuk melakukan penilaian terhadap calon pemimpin tertentu
4. **Aspek Aplikasi MIS & DSS** → berupa sistem informasi yang akan digunakan para pengambil keputusan di lingkungan Universitas dalam proses pemilihan pimpinan. Yang termasuk para mengambil keputusan disini adalah senat universitas, anggota panel pemilihan pimpinan, para direktur dan manajer, serta atasan langsung dari posisi yang ditawarkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi E-Demokrasi untuk Pemilihan Pimpinan di lingkungan Univesitas Paramadina terdiri dari 3 modul utama yaitu :

1. Modul Aplikasi di sisi CMS → modul ini digunakan oleh para calon pemimpin untuk mempromosikan dirinya, setiap kandidat bisa mengembangkan websitenya masing-masing untuk mendapat penilaian dari civitas akademika yang diberi hak untuk ikut serta dalam pemilihan dan mendapat penilaian dari dewan pertimbangan (senat, anggota panel pemilihan, direktur, manager, atasan langsung)
2. Modul Aplikasi di sisi Pengguna WEB → modul ini digunakan oleh civitas akademika yang diberi hak untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin untuk melakukan penilaian dan memberikan aspirasinya untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh dewan pertimbangan dalam penentuan pemimpin di lingkungan kampus
3. Modul Aplikasi di sisi MIS dan DSS → modul ini digunakan oleh dewan pertimbangan untuk melihat hasil penilaian terhadap seorang calon pemimpin oleh civitas akademika, keputusan dalam menentukan pimpinan di lingkungan kampus harus mempertimbangan hasil penilaian tersebut.



Gambar 2 : Model Aplikasi E-democracy Pemilihan Pimpinan di Universitas Paramadina

5. KESIMPULAN

Bentuk e-democracy bisa berbentuk aplikasi website atau mobile voting. Di dalam e-democracy dibutuhkan jalur komunikasi, bisa melalui internet atau jaringan seluler, untuk penerapan e-democracy diperlukan perbaikan proses dan penggunaan teknologi terbaru. Melalui demokrasi berbasis elektronik ini, aspirasi civitas akademika di lingkungan kampus dalam proses pemilihan pemimpin dapat dimasukkan dalam software khusus, aspirasi tersebut dapat berupa penilaian tentang karakteristik, prestasi, dan potensi calon pemimpin, keluhan dan harapan pada calon pemimpin tersebut.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi sudah seharusnya Pemilihan pimpinan diselenggarakan secara langsung mulai dari tingkat terendah misalnya ketua program studi sampai tingkat tertinggi yaitu rektor. Sebagai perbandingan, pemilihan presiden dan kepala daerah saja dilangsungkan secara langsung. Padahal sebagian besar tingkat pendidikan dan pengetahuan politik di masyarakat negeri ini masih sangat rendah bahkan banyak

diantaranya yang butu huruf. Jika masyarakat awam saja diberikan kepercayaan untuk ikut menenukan nasib bangsa dan daerahnya ini, mengapa warga kampus yang 100 % melek huruf dan berpendidika tinggi tidak dilibatkan dalam proses pemilihan pimpinan kampusnya, apakah yang berhak menentukan nasib kampus ini hanya segelinteri orang yang tergabung dalam barisan senat saja seperti pada kondisi sebagian besar di perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Wacana demokrasi dan good governance termasuk konsep pemilihan langsung tidak bisa dipungkiri berasal dari kalangan intelektual perguruan tinggi. Universitas Paramadina melalui pengembangan aplikasi E-democracy memiliki moment yang tepat untuk menunjukkan bahwa perguruan tinggi juga mampu berdemokrasi dan menerapkan good university governance. Universitas Paramadina ingin mewacanakan pemilihan pimpinan ke depan dapat dilaksanakan secara langsung termasuk pemilihan rektor. Dalam setiap pelaksanaan pemilihan pimpinan dilingkungan kampus akan melibatkan civitas akademika yang terdiri dari dosen, karyawan dan mahasiswa, sedangkan senat perguruan tinggi memiliki tugas pokok untuk memberikan pertimbangan kepada penyelenggaraan perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 pasal 29 yang menyebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi sebagai penanggung jawab utama pada perguruan tinggi, disamping melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat perguruan tinggi, dan pasal 30 yang menyebutkan senat perguruan tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Dadan Umar Daihani, 2001, Komputerissi Pengambilan Keputusan, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
2. Turban Efraim, 2005 Decision Support Systems And Intelligent Systems, Edisi 7 Jilid 1 & 2, Andi , Yogyakarta
3. Gun Gun Gunawan S.ST, 2007, Web Content Management System dengan PHP dan MySQL, <http://putragaluh.web.id>
4. Fashbir Noor Sidin, 2008, Membangun Demokrasi di Kampus, [http:// www.padangekspres.co.id](http://www.padangekspres.co.id)
5. Mahyuni , 2009, Pemilihan Dekan Secara Langsung, Mungkinkah, [http:// www.banjarmasinpost.co.id](http://www.banjarmasinpost.co.id)
6. Agus Setiadi, 2006, Pemilihan Rektor Langsung, Why Not, [http :// arsip.pontianakpost.com/berita](http://arsip.pontianakpost.com/berita)